



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIWIK SETIYANI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **895859**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **5.850.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
3. Bangunan Seluas 9.125 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 1.000.000.000
4. Bangunan Seluas 1.328 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 350.000.000
5. Bangunan Seluas 5.500 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Bangunan Seluas 2.643 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **300.000.000**

1. MOTOR, ISUZU ISUZU MUX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **175.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **30.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**



Sub Total	Rp.	6.355.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.355.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.